

Evaluasi kebijakan pinjaman luar negeri : Studi kasus pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Tetty Rostiati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=109263&lokasi=lokal>

Abstrak

Thesis ini merupakan suatu penelitian deskriptif dan kualitatif yang dilengkapi dengan metode studi kasus. Studi kasus atas administrasi dan kebijakan publik pinjaman luar negeri dilakukan dengan melakukan evaluasi atas bantuan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) di Indonesia. Mengingat bahwa proses pembuatan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang kompleks (rumit), dimana tidak satu modelpun dapat secara penuh dapat mengintegrasikan banyak faktor (variable) dalam suatu pengambilan kebijakan publik, maka pilihan analisis dalam thesis ini digunakan analisa kualitatif. Sebagaimana dimaklumi, hal yang paling sentral dari proses kebijakan publik, adalah dalam hal pelaksanaannya (implementasinya), sehingga proses pelaksanaan yang buruk akan menjadikan rencana yang sudah digariskan akan jauh menyimpang dengan kenyataan yang ada.

Melalui data serta informasi dapat diperoleh gambaran/deskripsi serta kecenderungan pola hubungan antara berbagai faktor yang dominan dalam proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri. Berbagai informasi yang ada tersebut dipilah-pilah sesuai dengan model yang diperkenalkan oleh Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985). Kedua model tersebut menjelaskan pola hubungan input, proses, dan output, serta feedback, dalam suatu lingkungan tertentu.

Oleh karena itu, model Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985) tersebut dipergunakan secara bersama-sama dalam menjelaskan item demi item proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri.

Perdebatan mengenai manfaat/efektivitas bantuan luar negeri bagi negara penerima bantuan banyak diperdebatkan oleh banyak peneliti yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, khususnya yang menyangkut apakah bantuan luar negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima bantuan. Perdebatan tersebut juga mencakup "selfish motivation" dari negara donor. Diakui bahwa bantuan luar negeri merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang bermanfaat, namun efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa hal, tidak semuanya semata-mata karena faktor ekonomis, ataupun yang langsung terkait dengan bantuan itu sendiri, melainkan ada faktor-faktor non-ekonomis, seperti misalnya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk melihat persoalan administrasi dan kebijakan pinjaman luar negeri, perlu diperhatikan hal-hal terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi.

Walaupun kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah umumnya sulit untuk diukur, karena biasanya kebijakan/program tersebut umumnya memiliki definisi yang longgar sifatnya. Evaluasi atas kebijakan dapat dilihat dari beberapa tingkatan: policy level, program level, dan project level. Lebih jauh

lagi, hubungan antara cara (means) dan hasil (ends) tidaklah sederhana. Selain itu juga dalam banyak kasus, suatu keputusan diambil melalui tawar-menawar dengan banyak pihak (multilateral bargaining), namun demikian melalui contoh-contoh yang diberikan dalam thesis ini, (dari lingkup yang besar/makro, seperti APBN; public expenditure management, maupun lingkup kecil/mikro, seperti proyek yang dibiayai JBIC) dapat diketahui rumitnya suatu proses pengambilan keputusan, sebagai akibat tarik-menarik dari berbagai kepentingan masing-masing stakeholders, baik di Indonesia maupun di negara donor (dalam hal ini Jepang).

This thesis is based upon a descriptive-qualitative research supplemented by case study method. A study on the administration and public policy involving off-shore loan is conducted through an evaluation of Japan Bank for International Cooperation Loan (JBIC) for Indonesia. Considering the fact that public policy making process is a complex process where no known model can integrate all or even most variables relevant to public policy decision making, the choice of analytical approach for this thesis is qualitative.

The most central aspect in public policy processing is its implementation, the failure in ensuring the effective implementation of a policy will only, mean that the target of that policy will be far than reachable.

Through data and information accumulated, a clearer view and description of the patterns of relationship between and among dominant factors in administration and public policy making process related to off-shore loan can be obtained. Various information collected is classified according to the model introduced by Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver- S. (1985). Both patterns explained the relation of input, process and output as well as feedback within a particular environment.

In light of this Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver S. (1985) models are utilized simultaneously in describing item by item the administration and public policy making process related to off-shore loan.

The debate on benefits of off-shore loan for recipient countries is widely occurred among researchers, resulting in a pro and contra opinion of foreign loan contribution towards the economic growth of recipient countries. The debate also covers the issue of "selfish motivation" of donor countries. It 's a widely acknowledge fact that foreign loan is one of many potential sources of economic development, however its effectiveness depends on several factors which may not be entirely economic or relevant to the loan itself but may fall into the non-economic category such as a decision making process. In relation t o this, to observe administration and foreign loan policy issues factors related to macro and micro economic aspect must also be considered.

Although the government policies and programs are relatively difficult to measure, since program of this type has a somewhat broader definition, the policy can still be evaluated by conducting observation on several levels: policy level, program level and project level. Furthermore the relationship between means and ends is not as simple as commonly thought. In many cases decision is made through a process of multilateral bargaining, as a result, through the samples presented in this thesis, (from a macro scope, such as state budget,- public expenditure management as well as micro scope, such as project financed by JBIC) we will obtain a glimpse on the complexity of a decision making process as a result of clash of stakeholders interest both in the recipient and donor countries.